

muncul, sedangkan dampak merupakan efek yang ditimbulkan oleh kejadian/peristiwa tersebut. Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (risk register), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Dengan demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dari Pemerintah Kota Denpasar wajib juga menerapkan manajemen risiko di lingkungannya, dimulai dari pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko, dan menyusun pelaporan atas penilaian risiko secara periodik. Hal ini agar dapat mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat Kota Denpasar dalam hal penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, dan penanggulan non bencana / kebakaran.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam menyusun laporan pengelolaan risiko ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 20);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 2).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi / rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan IV

1) Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 12 (dua belas) risiko (populasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada **lampiran 1 (Form 4 MR OPD)**.

2) Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 12 (dua belas) risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 (nol) risiko atau 0% dari 12 risiko, yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **lampiran 2 (Form 5 MR OPD)**.
- b. Seluruh prioritas telah memiliki *existing control* sebanyak 12 (dua belas) risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas dapat dilihat pada **lampiran 3 (Form 7 MR OPD)**.
- c. Sebanyak 12 (dua belas) risiko prioritas telah memiliki *existing control* namun belum memadai sebanyak 12 (dua belas) Risiko atau 0% dari jumlah / populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **lampiran 3 (Form 7 MR OPD)**

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan IV

- 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan IV sebanyak 12 (dua belas) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **lampiran 4 (Form 8 MR OPD)**.
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan IV sebanyak 12 (dua belas) atau 100,00% dari 12 (dua belas) kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **lampiran 5 (Form 9 MR OPD)**.
- 3) Terdapat 0 (nol) kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Implementasi manajemen risiko, termasuk pengelolaan risiko pada BPBD Kota Denpasar di triwulan IV dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti :

No	Risiko	Hambatan
1	Timbulnya korban bencana dan kerugian materi	Adanya kejadian bencana yang tidak diprediksi menimpa masyarakat
2	Pemenuhan kegiatan pengadaan barang milik daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu	Masih adanya barang yang belum bisa direalisasikan dikarenakan terkendala TKDN
3	Kurangnya informasi mengenai kebencanaan	Lokasi sosialisasi KIE lebih banyak diadakan di pusat kota dibanding wilayah pesisir
4	Meningkatnya jumlah korban bencana	Terkendalanya pemenuhan sarpras kebencanaan, karena perlu adanya pengecekan TKDN dan PDN pada suatu produk
5	Meningkatnya jumlah korban bencana	Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya, termasuk dampak yang diakibatkan

BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP

Terdapat kejadian risiko yang muncul pada triwulan IV sebanyak 4 (empat) kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada **lampiran 6 (Form 10 MR OPD)**.

BAB V PENUTUP

Laporan Pengelolaan Risiko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Triwulan IV Tahun 2024 memuat pelaksanaan dari manajemen risiko yang terdiri dari pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko, dan menyusun laporan atas penilaian risiko secara periodik. Sehingga tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat Kota Denpasar dalam hal penanggulangan bencana dapat tercapai.

Denpasar, 6 Januari 2025

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.

Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19680627 198812 1 002

Lampiran 1 – Form 4

HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: 1) Meningkatkan pemenuhan layanan BPBD Kota Denpasar 2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Strategis OPD				
1	Timbulnya korban bencana dan kerugian materi	RSO.24.05.32.01	3	3	9
III	Risiko Operasional OPD				
1	Pemenuhan kegiatan penunjang perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.01	3	1	3
2	Pemenuhan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.02	3	1	3
3	Pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.03	2	1	2
4	Pemenuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.04	3	2	6
5	Pemenuhan kegiatan pengadaan barang milik daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.05	3	2	6
6	Peningkatan tagihan listrik, air, telpon, pembayaran BPJS	ROO.24.05.32.06	2	2	4
7	Pemenuhan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah tidak terselesaikan tepat waktu dan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM serta kerusakan barang milik daerah yang tidak terduga	ROO.24.05.32.07	2	3	6
8	Kurangnya informasi mengenai kebencanaan	ROO.24.05.32.08	2	2	4
9	Meningkatnya jumlah korban bencana	ROO.24.05.32.09	3	2	6

10	Meningkatnya jumlah korban bencana	ROO.24.05.32.10	3	2	6
11	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	ROO.24.05.32.11	2	1	2

Denpasar, 6 Januari 2025

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.

Pembina Utama Muda / IV/c

NIP. 19680627 198812 1 002

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: 1) Meningkatkan pemenuhan layanan BPBD Kota Denpasar 2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Strategis OPD					
1	Timbulnya korban bencana dan kerugian materi	RSO.24.05.32.01	9	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas SDM. 2. Sarana prasarana yang belum memadai. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 4. Adanya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya korban bencana. 2. Adanya kerugian materi akibat bencana. 3. Kemungkinan adanya perbedaan pada saat perencanaan dan pada saat realisasi, sehingga terjadi keterlambatan.

III	Risiko Operasional OPD					
1	Pemenuhan kegiatan penunjang perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.01	3	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan adanya perbedaan pada saat perencanaan dan pada saat realisasi, sehingga terjadi keterlambatan. 2. Keterlambatan dalam proses administrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan anggaran dari yang direncanakan maupun pencairan yang melewati anggaran kas yang ditetapkan. 2. Keterlambatan administrasi yang berdampak pada terlambatnya pencairan anggaran.
2	Pemenuhan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.02	3	Sekretaris BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dokumen kepegawaian dan tanda tangan daftar penerimaan sehingga berpengaruh terhadap proses administrasi pada saat akan di realisasikan. 2. Terdapat mutasi pejabat dan pegawai, pensiun, meninggal dunia, sehingga anggaran yang tersedia belum tentu mencukupi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan diterimanya gaji dan tunjangan ASN. 2. Kekurangan / kelebihan anggaran dari yang tersedia.
3	Pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.03	2	Sekretaris BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dalam proses administrasi. 2. Terdapat perbedaan antara yang dianggarkan dengan yang akan direalisasikan, baik dari kebutuhan dan harganya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan administrasi yang berdampak pada terlambatnya pencairan anggaran.
4	Pemenuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.04	6	Sekretaris BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebutuhan tidak memperhatikan rekap inventaris persediaan ataupun laporan realisasi periode sebelumnya. 2. Terdapat perbedaan harga antara yang dianggarkan dengan yang akan direalisasikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan akibat tidak tersedianya barang. 2. Terdapat kelebihan anggaran 3. Keterlambatan administrasi yang berdampak pada

					3. Keterlambatan dalam proses administrasi.	terlambatnya pencairan anggaran.
5	Pemenuhan kegiatan pengadaan barang milik daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.05	6	Sekretaris BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses administrasi yang terlambat. 2. Terdapat perbedaan antara yang dianggarkan dengan yang akan direalisasikan, baik dari kebutuhan dan harganya. 3. Pemenuhan nilai TKDN dan PDN 4. Ketidaksiesuaian pada saat penyusunan RKBMD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan administrasi yang berdampak pada terlambatnya pencairan anggaran. 2. Barang yang akan dibeli belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang dicari karena harus memperhatikan nilai TKDN dan PDN. 3. Adanya perbedaan antara RKBMD dengan yang ada di RKA.
6	Peningkatan tagihan listrik, air, telpon, pembayaran BPJS	ROO.24.05.32.06	4	Sekretaris BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan. 2. Kemungkinan adanya perbedaan pada saat perencanaan dan pada saat realisasi, khususnya untuk tagihan listrik, air, telpon. 3. Ketidaktepatan perhitungan BPJS, sehingga terdapat kekurangan/kelebihan. 4. Keterlambatan dalam proses administrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan administrasi yang berdampak pada terlambatnya pencairan anggaran. 2. Kekurangan anggaran, sehingga tidak bisa terbayarkan.

7	Pemenuhan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah tidak terselesaikan tepat waktu dan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM serta kerusakan barang milik daerah yang tidak terduga	ROO.24.05.32.07	6	Sekretaris BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan adanya perbedaan pada saat perencanaan dan pada saat realisasi, khususnya terkait pemeliharaan BMD karena kerusakan yang tidak dapat diprediksi. 2. Kenaikan harga BBM 3. Keterlambatan dalam proses administrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan administrasi yang berdampak pada terlambatnya pencairan anggaran. 2. Kekurangan anggaran, sehingga tidak bisa terbayarkan.
8	Kurangnya informasi mengenai kebencanaan	ROO.24.05.32.08	4	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya informasi, sosialisasi, dan edukasi terkait penanggulangan bencana terutama pada warga negara yang berada di daerah pesisir. 2. Banyaknya warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya pemahaman dan informasi di masyarakat akan kebencanaan. 2. Kemungkinan adanya perbedaan pada saat perencanaan anggaran dan pada saat realisasi, sehingga terjadi keterlambatan.
9	Meningkatnya jumlah korban bencana	ROO.24.05.32.09	6	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik - Kepala UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai. 2. Kurangnya pendataan akan sarana dan prasarana yang dimiliki. 3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana belum maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana prasana yang tersedia dan siap digunakan pada saat bencana. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 3. Kemungkinan adanya perbedaan pada saat perencanaan anggaran dan pada saat realisasi, sehingga terjadi keterlambatan.

10	Meningkatnya jumlah korban bencana	ROO.24.05.32.10	6	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik - Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas SDM pada saat penanggulangan bencana. 2. Terbatasnya penyediaan logistik pasca bencana. 3. Belum optimalnya koordinasi lintas instansi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya korban bencana. 2. Adanya kerugian materi akibat bencana. 3. Kemungkinan adanya perbedaan pada saat perencanaan dan pada saat realisasi, sehingga terjadi keterlambatan. 4. Pelaksanaan tugas dilapangan yang kurang terkoordinasi.
11	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	ROO.24.05.32.11	2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Minimnya dasar hukum terkait kebencanaan di daerah	Kurangnya dasar hukum terkait kebencanaan di daerah.

Denpasar, 6 Januari 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.

Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19680627 198812 1 002

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN (RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2024						
Tujuan Strategis	: 1) Meningkatkan pemenuhan layanan BPBD Kota Denpasar 2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Strategis OPD						
1	Timbulnya korban bencana dan kerugian materi	RSO.24.05.32.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha terkait pencegahan kebencanaan. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 3. Penyamaan persepsi / pemahaman melalui rapat koordinasi lintas instansi. 	Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi kapan terjadi dan jumlah korbannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi selain tatap muka, ditambahkan dengan media sosial. 2. Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan. 3. Pemberian pelatihan bagi aparatur terkait kebencanaan. 4. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD, bila pada saat pergeseran tidak bisa. 	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Triwulan IV

III	Risiko Operasional OPD						
1	Pemenuhan kegiatan penunjang perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas 2. Evaluasi atas laporan realisasi fisik dan keuangan periode sebelumnya. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD, bila pada saat pergeseran tidak bisa. 	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Triwulan IV
2	Pemenuhan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan daftar rapelan gaji dan tunjangan ASN di bulan berikutnya. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD, bila pada saat pergeseran tidak bisa. 	Sekretaris BPBD	Triwulan IV
3	Pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD, bila pada saat pergeseran tidak bisa. 	Sekretaris BPBD	Triwulan IV
4	Pemenuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD, bila pada saat pergeseran tidak bisa. 2. Merujuk pada laporan realisasi dan rekap inventaris persediaan untuk perencanaan di periode berikutnya. 	Sekretaris BPBD	Triwulan IV

5	Pemenuhan kegiatan pengadaan barang milik daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.05.32.05	1. Mencari kembali barang dengan spesifikasi yang mendekati dan masih termasuk PDN.		1. Mengusulkan penyesuaian RKBMD. 2. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD.	Sekretaris BPBD	Triwulan IV
6	Peningkatan tagihan listrik, air, telpon, pembayaran BPJS	ROO.24.05.32.06	1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas.		1. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD, bila pada saat pergeseran tidak bisa atau tetap masih kurang. 2. Menghitung kembali terkait penyediaan pembayaran listrik, air, telpon berdasarkan realisasi periode sebelumnya.	Sekretaris BPBD	Triwulan IV
7	Pemenuhan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah tidak terselesaikan tepat waktu dan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM serta kerusakan barang milik daerah yang tidak terduga	ROO.24.05.32.07	1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas		1. Menyesuaikan RKBMD. 2. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD, bila pada saat pergeseran tidak bisa atau tetap masih kurang.	Sekretaris BPBD	Triwulan IV

8	Kurangnya informasi mengenai kebencanaan	ROO.24.05.32.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat dan dunia usaha. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi selain tatap muka, ditambahkan dengan media sosial. 2. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD, bila pada saat pergeseran tidak bisa. 	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan IV
9	Meningkatnya jumlah korban bencana	ROO.24.05.32.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 3. Optimalisasi sarana prasarana yang ada. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam RKBMD. 2. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi selain dengan tatap muka, ditambahkan dengan media sosial. 3. Mengusulkan penyesuaian di perubahan APBD, bila pada saat pergeseran tidak bisa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik - Kepala UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana 	Triwulan IV
10	Meningkatnya jumlah korban bencana	ROO.24.05.32.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwali No. 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, Dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat Serta Fasilitas Umum Korban Bencana 2. Perwali No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganggarkan secara berkala terkait logistik family kit yang diberikan kepada masyarakat korban bencana. 2. Mengadakan rapat dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan kebencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik - Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 	Triwulan IV

			<p>Perwali No. 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santuan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat Serta Fasilitas Umum Korban Bencana</p> <p>3. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/152/HK/2022 Tahun 2022 Pembentukan Tim Pendataan dan Verifikasi Pasca bencana Terhadap Permohonan Bantuan Sosial Untuk Perbaikan Rumah Masyarakat Dan Fasilitas Umum Akibat Terjadinya bencana Alam Dan bencana Sosial</p> <p>4. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/153/HK/2022 Tahun 2022 Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Dalam</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			Rangka Pendataan dan Pelaporan Pasca bencana 5. Laporan Monev Pasca Bencana				
11	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	ROO.24.05.32.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwali No. 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah 2. Perwali No. 19 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat dan Badan Daerah 3. Perwali No. 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, Dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat Serta Fasilitas Umum Korban Bencana 4. Perwali No. 5 Tahun 2023 5 tentang Perubahan Atas Perwali No. 39 Tahun 2021 tentang 		Menyusun konsep atau naskah akademik terkait regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan IV

			Pedoman Pemberian Santuan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat Serta Fasilitas Umum Korban Bencana				
--	--	--	---	--	--	--	--

Denpasar, 6 Januari 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19680627 198812 1 002

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2024						
Tujuan Strategis	: 1) Meningkatkan pemenuhan layanan BPBD Kota Denpasar 2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Strategis OPD						
1	<p>Risiko : Timbulnya korban bencana dan kerugian materi</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha terkait pencegahan kebencanaan. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 3. Penyamaan persepsi / pemahaman melalui rapat koordinasi lintas instansi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Sosialisasi 5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 6. Gladi / Simulasi 7. Rapat Koordinasi 8. Aturan / Kebijakan 9. Laporan 10. Dokumentasi Kegiatan 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan UPTD Pusdalops PB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Denpasar 2. Masyarakat 3. Aparatur 4. Instansi Terkait 	Triwulan IV	Triwulan I - Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilaksanakan sosialisasi KIE secara berkala setiap bulannya kepada sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, instansi swasta. - Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat di Bulan September 2024. - Telah dilaksanakan monev pasca bencana setiap ada kejadian bencana oleh tim monev

II Risiko Operasional OPD							
1	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan penunjang perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas 2. Evaluasi atas laporan realisasi fisik dan keuangan periode sebelumnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Aturan / Kebijakan 5. Laporan 6. Dokumen Pertanggungjawaban 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur 2. Instansi Terkait 	Triwulan IV	Triwulan IV	- Pemenuhan kegiatan penunjang perangkat daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia.
2	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan daftar rapelan gaji dan tunjangan ASN di bulan berikutnya. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Aturan / Kebijakan 5. Laporan 6. Dokumen Pertanggungjawaban 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur 2. Instansi Terkait 	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. - Adanya penambahan anggaran untuk kesiapan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.

3	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Aturan / Kebijakan 5. Laporan 6. Dokumen Pertanggungjawaban 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur 2. Instansi Terkait 3. Penyedia 	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. - Pengadaan pakaian dinas sudah dilaksanakan untuk seluruh pegawai BPBD.
4	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Aturan / Kebijakan 5. Laporan 6. Dokumen Pertanggungjawaban 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur 2. Instansi Terkait 3. Penyedia 	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. - Terdapat penyesuaian anggaran pada perubahan 2024 untuk memastikan kecukupan pemenuhan kegiatan administrasi umum.
5	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan pengadaan barang milik daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari kembali barang dengan spesifikasi yang mendekati dan masih termasuk PDN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Aturan / Kebijakan 5. Laporan 6. Dokumen Pertanggungjawaban 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur 2. Instansi Terkait 3. Penyedia 	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan pengadaan barang milik daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. - Masih adanya barang yang belum bisa direalisasikan dikarenakan terkendala TKDN.

6	<p>Risiko : Peningkatan tagihan listrik, air, telpon, pembayaran BPJS</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Aturan / Kebijakan 5. Laporan 6. Dokumen Pertanggungjawaban 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur 2. Instansi Terkait 3. Penyedia 	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. - Terdapat penambahan dana di perubahan 2024 untuk memastikan kecukupan pembayaran tagihan listrik, air, telpon, pembayaran BPJS.
7	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah tidak terselesaikan tepat waktu dan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM serta kerusakan barang milik daerah yang tidak terduga.</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Aturan / Kebijakan 5. Laporan 6. Dokumen Pertanggungjawaban 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur 2. Instansi Terkait 3. Penyedia 	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. - Terdapat penambahan dana di perubahan 2024 dikarenakan adanya penambahan biaya akibat perbaikan kendaraan, peralatan dan mesin.

8	<p>Risiko : Kurangnya informasi mengenai kebencanaan</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat dan dunia usaha. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Sosialisasi 5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 6. Rapat Koordinasi 7. Aturan / Kebijakan 8. Laporan 9. Dokumen Pertanggungjawaban 	<p>Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Pemerintah Kota Denpasar 3. Instansi Terkait 	Triwulan IV	Triwulan I – Triwulan IV	<p>Sudah dilaksanakan sosialisasi KIE secara berkala setiap bulannya kepada sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, instansi swasta.</p>
9	<p>Risiko : Meningkatnya jumlah korban bencana</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 3. Optimalisasi sarana prasarana yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAK / TOR 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 4. Sosialisasi 5. Gladi / Simulasi 6. Pelatihan 7. Rapat Koordinasi 8. Aturan / Kebijakan 9. Laporan 10. Dokumen Pertanggungjawaban 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah - UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Pemerintah Kota Denpasar 3. Instansi Terkait 	Triwulan IV	Triwulan I - Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat di Bulan September 2024. - Pengelolaan informasi kebencanaan yang diterima Pusdalops PB sudah dilaksanakan secara rutin tiap bulannya. - Adanya penambahan anggaran di perubahan 2024 untuk pelaksanaan pelatihan gladi kepada desa / kelurahan di Kota Denpasar di Bulan Oktober 2024.

							- Telah tersusunnya rencana kontijensi bencana di Bulan Desember 2024.
10	<p>Risiko : Meningkatnya jumlah korban bencana</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya dasar hukum terkait monitoring dan evaluasi kebencanaan Laporan Monev Pasca Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> KAK / TOR Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penanganan Kejadian Rapat Koordinasi Aturan / Kebijakan Laporan Dokumen Pertanggungjawaban 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar Instansi Terkait 	Triwulan IV	Triwulan I – Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan monev pasca bencana setiap ada kejadian bencana oleh tim monev. Adanya penambahan mobil ambulance jenazah untuk evakuasi di Bulan Desember 2024.
11	<p>Risiko : Persentase tersedianya dokumen kebencanaan</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan data dukung penilaian Indeks Ketahanan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> KAK / TOR Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kajian Rapat Koordinasi Aturan / Kebijakan Laporan Dokumen Pertanggungjawaban 	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Denpasar Masyarakat Instansi Terkait 	Triwulan IV	Triwulan IV	- Telah tersusunnya naskah akademik dokumen kebencanaan di Bulan Desember 2024.

Denpasar, 6 Januari 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.

Repinna Utama Muda / IV/c
NIP. 19680627 198812 1 002

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: 1) Meningkatkan pemenuhan layanan BPBD Kota Denpasar 2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Strategis OPD					
1	<p>Risiko : Timbulnya korban bencana dan kerugian materi</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha terkait pencegahan kebencanaan. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 3. Penyamaan persepsi / pemahaman melalui rapat koordinasi lintas instansi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi 2. Laporan Evaluasi 3. Dokumen / Peraturan Kebencanaan 4. Dokumentasi Kegiatan 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan UPTD PUSDALOPS PB	Triwulan IV	Triwulan I - Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilaksanakan sosialisasi KIE secara berkala setiap bulannya kepada sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, instansi swasta. - Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat di Bulan September 2024. - Telah dilaksanakan monev pasca bencana setiap ada kejadian bencana oleh tim monev
III	Risiko Operasional OPD					

1	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan penunjang perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas 2. Evaluasi atas laporan realisasi fisik dan keuangan periode sebelumnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi 2. Laporan Evaluasi 3. Dokumentasi Kegiatan 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan penunjang perangkat daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia.
2	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan daftar rapelan gaji dan tunjangan ASN di bulan berikutnya. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi 2. Laporan Evaluasi 3. Dokumentasi Kegiatan 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. - Adanya penambahan anggaran untuk kesiapan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.
3	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi 2. Laporan Evaluasi 3. Dokumentasi Kegiatan 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. - Pengadaan pakaian dinas sudah dilaksanakan untuk seluruh pegawai BPBD.
4	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi 2. Laporan Evaluasi 3. Dokumentasi Kegiatan 	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Triwulan IV	Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. - Terdapat penyesuaian anggaran pada perubahan 2024 untuk memastikan kecukupan pemenuhan kegiatan administrasi umum.

5	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan pengadaan barang milik daerah tidak sesuai kebutuhan dan administrasinya tidak terselesaikan tepat waktu</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <p>1. Mencari kembali barang dengan spesifikasi yang mendekati dan masih termasuk PDN.</p>	<p>1. Rapat Evaluasi</p> <p>2. Laporan Evaluasi</p> <p>3. Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>- Pemenuhan kegiatan pengadaan barang milik daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia.</p> <p>- Masih adanya barang yang belum bisa direalisasikan dikarenakan terkendala TKDN.</p>
6	<p>Risiko : Peningkatan tagihan listrik, air, telpon, pembayaran BPJS</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <p>1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas.</p>	<p>1. Rapat Evaluasi</p> <p>2. Laporan Evaluasi</p> <p>3. Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>- Pemenuhan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia.</p> <p>- Terdapat penambahan dana di perubahan 2024 untuk memastikan kecukupan pembayaran tagihan listrik, air, telpon, pembayaran BPJS.</p>
7	<p>Risiko : Pemenuhan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah tidak terselesaikan tepat waktu dan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM serta kerusakan barang milik daerah yang tidak terduga.</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <p>1. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas.</p>	<p>1. Rapat Evaluasi</p> <p>2. Laporan Evaluasi</p> <p>3. Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>- Pemenuhan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah sudah terlaksana sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia.</p> <p>- Terdapat penambahan dana di perubahan 2024 dikarenakan adanya penambahan biaya akibat perbaikan kendaraan, peralatan dan mesin.</p>
8	<p>Risiko : Kurangnya informasi mengenai kebencanaan</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p>	<p>1. Dokumentasi Kegiatan</p> <p>2. Laporan</p>	<p>Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>Triwulan I – Triwulan IV</p>	<p>Sudah dilaksanakan sosialisasi KIE secara berkala setiap bulannya kepada sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, instansi swasta.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat dan dunia usaha. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas 					
9	<p>Risiko : Meningkatnya jumlah korban bencana</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 2. Mengusulkan pergeseran anggaran dan anggaran kas. 3. Optimalisasi sarana prasarana yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi Kegiatan 2. Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah - UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana 	Triwulan IV	Triwulan I - Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat di Bulan September 2024. - Pengelolaan informasi kebencanaan yang diterima Pusdalops PB sudah dilaksanakan secara rutin tiap bulannya. - Adanya penambahan anggaran di perubahan 2024 untuk pelaksanaan pelatihan gladi kepada desa / kelurahan di Kota Denpasar di Bulan Oktober 2024. - Telah tersusunnya rencana kontijensi bencana di Bulan Desember 2024.
10	<p>Risiko : Meningkatnya jumlah korban bencana</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dasar hukum terkait monitoring dan evaluasi kebencanaan 2. Laporan Monev Pasca Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi 2. Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	Triwulan IV	Triwulan I – Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan monev pasca bencana setiap ada kejadian bencana oleh tim monev. - Adanya penambahan mobil ambulance jenazah untuk evakuasi di Bulan Desember 2024.

11	<p>Risiko : Persentase tersedianya dokumen kebencanaan</p> <p>Kegiatan Pengendalian :</p> <p>1. Pemenuhan data dukung penilaian Indeks Ketahanan Daerah</p>	<p>1. Rapat Evaluasi</p> <p>2. Laporan</p> <p>3. Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>Triwulan IV</p>	<p>Telah tersusunnya naskah akademik dokumen kebencanaan di Bulan Desember 2024.</p>
----	---	---	--	--------------------	--------------------	--

Denpasar, 6 Januari 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19680627 198812 1 002

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : 1) Meningkatkan pemenuhan layanan BPBD Kota Denpasar
 2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak				
II	Risiko Strategis OPD								
	NIHIL								
II	Risiko Operasional								
	NIHIL								

Denpasar, 6 Januari 2025
 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah Kota Denpasar

Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.
 Pembina Utama Muda / IV/c
 NIP. 19680627 198812 1 002